

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Era Globalisasi

Suhendri¹, Burlian Senjaya², Samia Elviria³

email: ¹suhendrimip@gmail.com, ²senjayaburlian@gmail.com, ³elviria@yahoo.com

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan ³Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Nurdin Hamzah, Jambi.

Abstract

This study is intended to analyze the role of government to improve people's welfare in the era of globalization. The discourse of globalization gave rise to radical groups who thought the government did not need to intervene in development because it was carried out by the private sector and skeptics who stated that precisely because of its many negative impacts globalization became an important entry point for the role of the state. Using the skeptical concept, public policy becomes a means of government, especially regional governments in the era of regional autonomy to play their role, as was done in Jambi Province. This study uses a qualitative approach by analyzing public policies of the Jambi Province Government and community welfare data. After the data is collected, it is analyzed using qualitative data analysis. The study results show that local governments play an important role in exploiting opportunities and preventing the negative impacts of globalization. Through a series of innovative and solutive policies, the Jambi Province Government seeks to improve the welfare of the community by utilizing the local potential it has. The development of vocational schools based on competition and local excellence, accelerated construction of rubber asphalt factories, accelerated development of the Merangin Geopark area, establishment of smallholder mining areas, Batanghari river Clean and land restoration is under threat are among the programs carried out by the Jambi Province Government. Significantly enough, these programs have an impact on people's lives through rising economic growth, the Human Development Index, and the Gini Index which are indicators of welfare.

Keywords: globalization, government role, public policy, welfare.

PENDAHULUAN

Kajian mengenai peran Pemerintah Provinsi Jambi melalui penerapan beragam kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era globalisasi ini menjadi menarik dan penting untuk dilakukan. Signifikannya studi ini karena beberapa alasan sebagaimana berikut ini, yaitu: Pertama, berdasarkan data BPS (2022), Provinsi Jambi mencapai pembangunan manusia di atas tujuh puluh sejak tahun 2018, yaitu sebesar 70,65 dan menjadi 72,14 di tahun 2022. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, tahun 2022 Provinsi Jambi menempati urutan ke-19 atau turun dua peringkat dibandingkan dengan tahun 2019. Tahun 2022, tiga provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta (81,65), D.I. Yogyakarta (80,64), dan Kalimantan Timur (77,44). Sejak tahun 2013, tiga provinsi dengan IPM tertinggi ini bertahan di posisi masing-masing. Fakta ini tentu saja membutuhkan 'sentuhan' yang baik dari Pemerintah Provinsi Jambi agar potensi besar tersebut dimanfaatkan

dan masalah dimaksud teratasi. Muaranya tentu saja terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat dalam segala aspeknya.

Kedua, penerapan globalisasi secara masif di seluruh dunia berdampak positif dan negatif bagi masyarakat sehingga pemerintah perlu mengambil peran yang signifikan guna memanfaatkan sisi 'baik' dan mengatasi aspek 'buruk' darinya (HM, 2020). Globalisasi secara masif diterapkan di seluruh dunia sejak tahun 1980 seiring dengan semakin dominannya Blok Barat yang dikomandoi oleh Amerika Serikat dalam percaturan dunia setelah runtuhnya Uni Sovyet dengan Blok Timurnya. Sebagai sebuah sistem, globalisasi tentu memunculkan dampaknya terhadap masyarakat dunia. Pada satu sisi, globalisasi berdampak positif bagi upaya memperoleh standar hidup yang layak (Friedman, 2007). Hal ini karena globalisasi menyediakan arena berkompetisi yang sama bagi setiap negara untuk memanfaatkan peluang yang disediakan. Fenomena kesuksesan Tiongkok dan India yang memanfaatkan

kesempatan-kesempatan yang disediakan globalisasi sehingga perekonomiannya mengalami peningkatan, bahkan kemudian menjadi dua kekuatan baru ekonomi dunia layak dikemukakan sebagai contoh. Akan tetapi sebaliknya, globalisasi ternyata juga memunculkan eksekusi negatif di seluruh dunia. Menurut Petras and Veltmeyer (2001), globalisasi hanya dinikmati oleh negara-Negara Maju, sementara negara-negara Dunia Ketiga hanya berperan sebagai penonton, bahkan menjadi korban dari beragam eksekusi negatif yang ditimbulkannya. Globalisasi juga memarginalisasi petani yang ada di negara-negara Dunia Ketiga karena berbagai aturan perdagangan global membuat mereka semakin terpinggirkan, bahkan tercerabut dari sistem, profesi dan cara hidup yang selama ini dilakoninya (HM, 2017, p.64). Globalisasi juga diklaim justru mengikis sistem ekonomi dan kebudayaan lokal yang ada di negara-negara

Dunia Ketiga karena proyek-proyek yang dibiayai oleh badan kapital (IMF) lebih banyak dilaksanakan di daerah-daerah tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu dengan penduduk lokal (HM, 2017, p.65). Globalisasi yang diklaim sebagai sarana menuju kesejahteraan masyarakat dunia ini tidak lebih hanya sebuah mitos, berdasarkan lima argumen berikut ini ((HM, 2016, p.46). *Pertama*, keterbukaan ekonomi internasional yang dijadikan jurus jitu para pendukung globalisasi untuk menarik simpati dunia sesungguhnya tidak lebih terbuka dibandingkan tahun 1870 sampai 1914. *Kedua*, eksistensi perusahaan transnasional murni sebagai salah satu agen globalisasi sulit ditemukan karena meskipun berbasis nasional, tetapi pemasarannya menjangkau lintas negara dan internasional untuk memperkuat aset nasional, produksi dan penjualannya. *Ketiga*, mobilitas modal yang diklaim para pendukung globalisasi akan mengalir deras ke Dunia Ketiga tidak sepenuhnya menjadi kenyataan karena lebih terkonsentrasi di negara-Negara Maju, sementara Dunia Ketiga tetap berada pada posisi terpinggirkan. *Keempat*, tujuan akan terciptanya ekonomi sebagaimana yang diklaim para pendukung globalisasi sesungguhnya tidak benar-benar terjadi karena arus perdagangan, investasi dan keuangan global lebih banyak berkonsentrasi di Tri Tunggal Eropa (Inggris, Perancis dan Jerman), Jepang dan Amerika

Utara, termasuk juga Tiongkok dan India. *Terakhir*, oleh karena tidak merata di seluruh dunia, maka Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, Amerika Serikat dan Kanada mengendalikan setiap aspek ekonomi dunia sejalan dengan tujuannya.

Sejalan dengan di atas, Tandon (2009, p.13) mengajukan fakta terkait tidak globalnya perekonomian dunia karena hanya dikuasai dan didominasi oleh tiga kekuatan dunia. Ketiga kekuatan utama dunia yang dinamai sebagai Triad tersebut adalah Amerika Utara, Eropa Barat dan Asia Timur menguasai sumberdaya yang dimiliki kawasan yang dihegemoninya (*hinterland*), sebagaimana dalam Tabel 1 di atas. Menurut Samir Amin (dikutip dalam HM, 2020), globalisasi adalah metamorphosis dari penjajahan ketiga yang dilakukan Barat terhadap Dunia Ketiga, setelah sebelumnya mempraktikkan merkantilisme dan imperialisme. Seiring dengan runtuhnya Uni Sovyet, maka pola imperialisme dalam format globalisasi yang dilakukan untuk memperkuat Trio Pusat (Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang) mendapatkan dukungan dari beberapa kekuatan, yaitu wewenang untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain yang diperkuat oleh demokrasi, hak rakyat dan kemanusiaan. Hal ini semakin diperkuat dengan strategi unjuk kekuatan militer Barat di berbagai negara yang berafiliasi dengannya untuk memastikan hegemoninya tetap kuat. Dalam konteks yang sama, Murshed (dikutip dalam HM, 2020) juga menyatakan bahwa globalisasi merupakan upaya yang dilakukan Barat, utamanya Inggris, dalam rangka menyebarkan modernitas dan kapitalisme ke seluruh penjuru dunia.

Demikian sederet dampak dan pandangan positif dan negatif dari pemberlakuan globalisasi di seluruh dunia yang ditengarai oleh banyak kalangan. Terkait dengan beberapa dampak di atas, diskursus globalisasi memunculkan perdebatan di kalangan ahli mengenai peran negara atau pemerintah dalam pembangunan. Isu peran yang dimainkan negara atau pemerintah menjadi salah satu tema sentral dalam perdebatan seputar globalisasi. Hal ini karena sebagai pihak yang diserahkan tanggungjawab pengelolaan negara, pemerintah sebagai manifestasi negara seharusnya berperan aktif

dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi rakyatnya. Peran dimaksud mewujudkan diri dalam kebijakan-kebijakan publik yang dimaknai oleh Steven A. Peterson (dalam Nugroho, 2017, p.203) sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi beragam masalah. Begitu pula kebijakan publik yang dipahami oleh Agustino (2016, p.19) sebagai sebuah tindakan yang dilakukan pihak oleh berwenang, memiliki maksud atau tujuan tertentu, tidak bersifat acak atau terencana, memiliki sasaran dan berorientasi pada tujuan, serta berlandaskan pada aturan yang berlaku. Globalisasi dengan segala dampaknya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar akses positifnya dapat dimanfaatkan dengan baik dan akses negatifnya dapat dihindari oleh rakyat.

Ketiga, pemerintah daerah memainkan peranan yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era otonomi daerah (Bird dan Vaillancourt, 1998; HM, 2019; 2020; Kisman and Tasar, 2014; Witkowski and Kiba-Janiak, 2014; Nak-ai etc., 2018; Sharma, 2015; dan Brillo, 2017). Sebagaimana diketahui bahwa pasca reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998, Indonesia mengubah paradigma pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi. Jika sebelumnya, urusan-urusan rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sepenuhnya, maka sistem desentralisasi membuatnya menjadi urusan pemerintah daerah. Tertujunya pilihan terhadap sistem yang juga dikenal sebagai otonomi daerah ini tentu tidak semata agar tampak berbeda dengan langkah yang dilakukan pemerintah Orde Baru yang digantikan. Dipilihnya desentralisasi karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional yang dilakukan oleh segenap pemimpin bangsa ini. Desentralisasi diyakini sebagai solusi efektif untuk mengatasi beragam problem yang muncul di kala Indonesia berada di masa sentralisasi.

Menurut Bird dan Vaillancourt (1998), sistem desentralisasi dipilih sebagai sistem pemerintahan karena memiliki beberapa keunggulan. *Pertama*, kebijakan desentralisasi yang menjadi dasar pengelolaan daerah pasca reformasi menjanjikan efisiensi ekonomi, efektivitas biaya program, akuntabilitas, peningkatan mobilisasi sumber daya, berkurangnya tingkat kesenjangan (*disparitas*),

peningkatan partisipasi politik, serta penguatan demokrasi dan stabilitas politik. *Kedua*, melalui desentralisasi, pemerintah lokal dinilai memiliki pengetahuan (*knowledge*) yang lebih baik tentang kebutuhan (*needs*) dan preferensi (*preferences*) warga masyarakatnya, maka proses pembangunan dalam model kebijakan desentralisasi seharusnya menjadi lebih efisien daripada model kebijakan sentralisasi dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Inilah beberapa keunggulan yang dimiliki oleh desentralisasi sehingga bermuara pada ditetapkannya sistem sebagai metode mengelola pemerintahan di Indonesia pasca reformasi. Pernyataan Bird dan Vaillancourt di atas sejalan dengan temuan-temuan penelitian yang dilakukan oleh Kisman and Tasar (2014) dan Witkowski and Kiba-Janiak (2014). Kedua penelitian ini memperlihatkan besarnya peranan pemerintah daerah (di Turki dan Polandia) dalam upaya mengatasi problem-problem sosial yang dihadapi masyarakat. Studi-studi ini juga menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dibandingkan ketika pemerintahan masih berada pada sistem sentralisasi. Di samping itu, studi yang dilakukan oleh Nak-ai etc. (2018), Sharma (2015) dan Brillo (2017) juga memperlihatkan bahwa peranan yang dimainkan pemerintah daerah dengan berkolaborasi dengan beberapa *stakeholders* mampu meningkatkan derajat hidup masyarakat.

Meskipun demikian, masalahnya adalah setelah cukup lama Indonesia menerapkan sistem desentralisasi ternyata hasilnya belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan beberapa studi (Hasjimzum, 2014; Tasrin dan Wulandari, 2012) memperlihatkan bahwa desentralisasi di berbagai daerah di Indonesia masih belum mampu mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pelaksanaannya dengan beragam faktor yang menyebabkannya. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian karena bagaimanapun juga kebijakan desentralisasi merupakan konsensus nasional sebagai solusi bagi masalah-masalah masyarakat selama di era sentralisasi. Karenanya, perlu dicarikan letak masalah yang dihadapi terkait dengan masih belum tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh HM (2021), Kisman and Tasar (2014), Witkowski and Kiba-Janiak (2014), Nak-ai etc. (2018), Sharma (2015) dan Brillo (2017) dapat ditarik kesimpulan bahwa terwujud atau tidaknya kesejahteraan masyarakat sangat tergantung dengan upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang didalamnya menyebutkan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah wajib memenuhi kebutuhan daerahnya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban diantaranya yaitu: meningkatkan kualitas dan kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, dan menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Dengan demikian, secara teoritis, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa model kebijakan desentralisasi seharusnya mampu membawa tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan bila dengan sistem sentralisasi (terpusat). Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang hendak diangkat dalam penelitian ini terkait dua hal, yaitu: bagaimanakah bentuk peran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin di era globalisasi dan bagaimanakah dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

METODE

Studi ini merupakan penelitian kualitatif yang dipahami sebagai sebuah pendekatan yang memberi peluang kepada peneliti untuk dapat melakukan deskripsi dan interpretasi secara detail agar mendapatkan pemahaman secara holistik (Marvasti, 2004, p.7-8). Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka dengan cara mereview data terkait dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2020-2022). Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan survei di lapangan dengan cara penelusuran data instansional

berupa pengumpulan dan atau perekaman data dari instansi-instansi terkait kebijakan pembangunan Provinsi Jambi (2020-2022), data sumberdaya alam (karet dan kelapa sawit) dan data kesejahteraan masyarakat.

Sebagai upaya menganalisis data yang sudah didapatkan dan dikumpulkan, maka digunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melalui tiga cara, yaitu: reduksi data (*reducing data*), penyajian data (*displaying data*), dan penarikan kesimpulan atau *drawing conclusion* (Miles and Huberman, 1992, p.88-90). Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selanjutnya, penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Cara terakhir yang digunakan adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu interpretasi atau penafsiran terhadap keseluruhan data yang terkumpul tersebut sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus Peran Negara di Era Globalisasi

Secara umum, globalisasi dipahami sebagai suatu proses penyebaran kebiasaan-kebiasaan yang mendunia, ekspansi hubungan yang melintasi benua, organisasi dari kehidupan sosial pada skala global, dan pertumbuhan dari sebuah kesadaran global bersama (HM, 2020). Menurut Giddens (2002, p.7), globalisasi merupakan intensifikasi relasi sedunia yang menghubungkan lokalitas yang saling berjauhan sedemikian rupa sehingga sejumlah peristiwa sosial dibentuk oleh peristiwa yang terjadi pada jarak bermil-mil dan begitu pula sebaliknya. Sementara menurut Hines (dikutip dalam HM, 2020), globalisasi pada hakikatnya merupakan suatu upaya sistematis untuk mengurangi semua hambatan perlindungan (*protective barriers*) terhadap arus barang-barang dan modal, oleh dan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan raksasa berdasarkan aturan-aturan perdagangan internasional. Atas dasar pemahaman di atas, globalisasi dapat dimaknai secara sederhana sebagai kompresi ruang dan waktu yang menjadi suatu keharusan dan periodisasi

perkembangan zaman dimana terdapat intensifikasi proses integrasi masyarakat di berbagai negara menjadi masyarakat dunia (HM, 2020).

Berlandaskan pada pendapat Giddens (2002, p.7-8), diskursus globalisasi memunculkan dua kelompok besar yang masing-masing melahirkan teori, yaitu Kelompok Radikal di satu sisi dan Kelompok Skeptis di sisi yang lain. Secara umum, kelompok radikal diidentifikasi sebagai kumpulan pemikir sosial yang mendukung globalisasi karena menganggapnya sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia, sementara skeptis dikenal sebagai kelompok intelektual yang meragukan kemungkinannya, bahkan menentang keberadaannya. Sebagai upaya mendukung pendapatnya, masing-masing kelompok ini mengajukan beragam asumsi dan data yang dimilikinya.

Perdebatan yang berlangsung antara Kelompok Radikal dan Skeptis terkait globalisasi terjadi seputar bagaimana seharusnya negara atau pemerintah berperan. Kelompok Radikal menganggap bahwa negara atau pemerintah tidak perlu mengambil posisi penting di era globalisasi, sebaliknya Kelompok Skeptis justru menyatakan harus lebih berperan. Secara historis, sebagai pihak yang secara konstitusional berperan penting dalam sebuah negara, pemerintah tidak selamanya menjadi pemain tunggal dalam pengelolaan negerinya. Catatan sejarah mengungkapkan dinamisnya peran yang dimainkan pemerintah dalam pembangunan negara. Ada saat ketika pemerintah sangat berperan, bahkan sangat absolut, dalam melakukan pembangunan dalam sebuah negara, akan tetapi ada pula masa dimana pemerintah tidak lebih sebagai pelengkap saja.

Secara historis, peran negara dalam pembangunan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: peran negara era tahun 1950-1960-an dan peran negara era 1970-an sampai sekarang (Winarno, 2005, p.135-159). Peran yang dimainkan negara di masa sebelum 1970-an sangat signifikan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan suatu bangsa, tetapi setelah tahun 1970 sampai sekarang terjadi pemangkasan peran yang dimainkan negara.

Perdebatan mengenai peran yang dijalankan negara atau pemerintah dalam pembangunan ini menurut Giddens (2002, p.7-8) memunculkan

dua kelompok besar yang masing-masing melahirkan teori, yaitu kelompok radikal di satu sisi dan kelompok skeptis di sisi yang lain. Secara umum, kelompok radikal diidentifikasi sebagai kumpulan pemikir sosial yang mendukung globalisasi karena menganggapnya sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia, sementara skeptis dikenal sebagai kelompok intelektual yang meragukan kemungkinannya, bahkan menentang keberadaannya. Sebagai upaya mendukung pendapatnya, masing-masing kelompok ini mengajukan beragam asumsi dan data yang dimilikinya.

Peran negara dalam pembangunan dimulai selama Perang Dunia Kedua dengan mengendalikan seluruh kekuatan nasional. Menurut Abidin (1986, p.20), peran pemerintah semakin signifikan setelah berakhirnya perang yang telah merusak beragam infrastruktur untuk meyakinkan rakyat akan keperluan pembangunan dan mengajaknya berpartisipasi, proses nasionalisasi beragam lembaga ekonomi yang ditinggalkan penjajah, koordinasi dan komplementaritas antar berbagai industri dan bisnis, dan melakukan pembangunan berencana yang terpusat.

Teori Keynes menjadi landasan perlunya intervensi pemerintah dalam setiap aspek pembangunan yang diwujudkan dengan Program Marshall Plan sehingga mengantarkan Amerika dan Eropa berjaya dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Langkah ini juga diikuti oleh beragam negara Dunia Ketiga, seperti Indonesia yang menerapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), Malaysia yang menerapkan berbagai kebijakan untuk memacu industrialisasi berturut-turut mulai tahun 1970 sampai tahun 1995 dan India yang membentuk Komisi Perencanaan Nasional sebagai upaya mendorong Rencana Lima Tahunan (Winarno, 2005, p.135-136).

Menurut Kamal Mathur (dalam HM, 2017, p.74), terdapat tiga cara yang dilakukan negara di masa sebelum tahun 1970 dalam upaya membangun bangsa, yaitu melalui belanja pemerintah, melalui mobilisasi sumberdaya dan melalui partisipasi dalam produksi industrial yang dilaksanakan dalam tiga wilayah kebijakan (investasi, perdagangan dan finansial). Wilayah pertama dilakukan negara dengan cara menerbitkan beragam kebijakan untuk menciptakan iklim investasi

yang kondusif sebagai upaya menarik minat para investasi asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Hal yang sama juga dilakukan negara terkait dengan kebijakan-kebijakan pada aspek perdagangan dan finansial yang berintikan penciptaan iklim yang memungkinkan perekonomian dapat berkembang dengan baik.

Terkait dengan hal ini, Michael Todaro (dalam HM, 2017, p.74) mengungkapkan faktor-faktor yang mendasari diperlukannya peran negara dalam pembangunan, yaitu: kegagalan pasar, mobilisasi sumberdaya dan dampak psikologis. Kegagalan pasar dalam menstabilisasikan komoditas dan harga berdampak pada mislokasi sumberdaya yang dapat berbahaya di masa mendatang. Mobilisasi sumberdaya diperlukan karena negara-negara berkembang umumnya menghadapi kendala kualitas sumberdaya manusia sehingga dengan adanya peran pemerintah membuat arah pembangunan menjadi lebih fokus. Dengan peran negara yang kuat dan dominan akan berdampak psikologis bagi masyarakat sehingga akan tercipta pembangunan yang dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

Peran negara yang dominan dalam pembangunan setelah Perang Dunia Kedua mulai mendapatkan kritikan yang dimulai pada tahun 1970 seiring dengan melambatnya perekonomian Amerika dan Eropa setelah berjaya selama hampir 25 tahun. Upaya mengurangi peran negara pertama kali dilakukan oleh Inggris di masa Perdana Menteri Margareth Thatcher dan di Amerika Serikat di bawah Presiden Ronald Reagan (Winarno, 2005, p.144). Pengurangan peran negara dilakukan Thatcher terhadap empat wilayah publik, yaitu: pelayanan kesehatan, pendidikan, santunan pengangguran dan pensiunan hari tua. Berbeda dengan di masa sebelum 1970 yang berparadigma *state-led development*, pemangkasan peran negara setelah kemenangan Kelompok Neoliberal di Eropa dan Amerika Serikat menggeser cara pandang kebijakan menjadi *market-led development*. Kritikan terhadap paradigma pembangunan yang selama ini diterapkan dan pemangkasan peran negara dalam pembangunan ini dilancarkan oleh kalangan yang berpandangan radikal. Hal ini karena globalisasi menurut kelompok ini dipahami sebagai sejarah baru yang terjadi

dalam kehidupan manusia yang menempatkan negara tradisional menjadi tidak lagi relevan, terutama dalam konteks unit-unit bisnis yang ada dalam sebuah ekonomi global. Bagi kaum radikal, batas-batas negara bukan waktunya lagi untuk dijadikan topik bahasan karena globalisasi sudah meluluhlantakkannya (Winarno, 2005, p.37). Di samping itu, dominannya peran negara dalam urusan-urusan perekonomian sebagaimana yang dipraktikkan sebelum tahun 1970 diklaim sebagai kekangan dan kungkungan yang menghambat efisiensi penggunaan sumberdaya-sumberdaya dunia yang langka (dalam HM, 2017, p.75).

Pengusulan pemangkasan peran negara dilakukan agar tujuan-tujuan globalisasi dalam digapai dengan sukses. Terkait dengan ini, Kenichi Ohmae (dalam HM, 2020) mengajukan empat alasan yang memperkuat pandangannya mengenai marginalisasi peran negara yang disebutnya sebagai Faktor "i". Investasi merupakan faktor "i" pertama, karena sebaran dana dapat menyebar ke tempat-tempat yang justru berada di luar wilayah asal dana tersebut. Faktor "i" kedua adalah industri, karena ekspansinya sudah tidak mengenal lagi batas-batas negara, tetapi berdasarkan pada pertimbangan pangsa pasar sehingga banyak perusahaan yang justru beroperasi jauh berada di luar wilayah asalnya. Teknologi informasi menjadi faktor "i" ketiga, karena pesatnya perkembangan kedua entitas ini sehingga mampu melintasi batas-batas negara, bahkan hanya dalam hitungan detik saja. Faktor "i" terakhir yang memperkuat pandangan Ohmae akan marginalisasi peran negara adalah konsumen-konsumen individual yang berorientasi global sudah dapat mengakses berbagai kebutuhan di seluruh dunia karena kemajuan teknologi informasi, tanpa terhambat oleh batas-batas negara.

Diskursus peran negara dalam pembangunan di era globalisasi ternyata belum berakhir dengan bergesernya kebijakan menjadi *market-led development* yang didukung oleh beberapa kalangan. Menurut Wolf (2016, p.5), pemangkasan peran negara dalam globalisasi justru melupakan sejarah karena perkembangan pesat globalisasi yang dijadikan alasan kelompok pendukungnya tidak dapat disangkal merupakan peran negara. Negara-negara yang menjadi aktor utama globalisasi (Amerika

Utara, Eropa Barat dan Asia Timur) saat ini bisa mendapatkan keuntungan yang besar melalui korporasi-korporasi dan lembaga-lembaga internasional merupakan implikasi dari peran negara melalui beragam kebijakan yang dihasilkannya. Di samping itu, Wolf (2016, p.5) juga mengatakan bahwa korporasi-korporasi dan lembaga-lembaga internasional yang menjadi agen utama globalisasi tentu membutuhkan arena wilayah untuk memainkan peranannya yang tentunya secara politik diwakili oleh negara. Masih dalam konteks yang sama, Kavaljit Singh (dalam HM, 2017, p.77) juga mengatakan bahwa peran negara justru semakin kuat dan sangat layak untuk dikemukakan di era globalisasi. Sebagai upaya menguatkan pendapatnya, tokoh radikal ini mengajukan beberapa alasan pembenar terkait semakin menguatnya peran negara di tengah masifnya kegiatan globalisasi di seluruh dunia. Alasan pertama, tidak semua negara berkurang atau melemah peranannya di era globalisasi, karena tingkatannya sangat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, tergantung dengan ukuran, kekuatan militer, dan kekuatan negara. Sebagai kekuatan utama dunia dan aktor utama globalisasi, peran Amerika Serikat tentu tidak melemah dibandingkan dengan beberapa negara Dunia Ketiga yang ada di Asia dan Afrika karena tingkatan ukuran, kekuatan militer dan kekuatan negaranya sangat berbeda.

Faktor penguat kedua adalah secara finansial ongkos yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menjadi bagian dari globalisasi tidak begitu signifikan menggerogoti keuangan negara. Hal ini karena sebuah negara yang semakin terintegrasi dengan negara-negara lainnya, maka pengeluaran negara akan cenderung bertambah daripada berkurang. Faktor ketiga, privatisasi sektor publik yang menjadi prasyarat bagi globalisasi yang disyaratkan oleh salah satu aktornya (IMF) bukan berarti penolakan terhadap intervensi negara. Hal ini karena, meskipun privatisasi di satu sisi dapat menyebabkan penurunan kepemilikan publik, namun di lain sisi kebijakan ini akan berdampak pada peningkatan regulasi negara melalui pembentukan otoritas, kebijakan regulasi persaingan, norma keterbukaan, dan langkah-langkah kebijakan baru lainnya. Faktor terakhir, meskipun peran negara akan berkurang pada aspek ekonomi, namun di sektor-sektor lain peran negara akan meningkat secara

signifikan, seperti meningkatnya sikap represif negara terhadap rakyatnya yang melakukan protes terhadap program pemerintah yang dianggap menguntungkan korporasi asing.

Memperkuat pandangan-pandangan di atas, Winarno (2005, p.148) mengajukan dua alasan yang mendasari sangat signifikannya peran negara di era globalisasi ini. *Pertama*, sebagai implikasi dari kolonialisme di masa lalu dan globalisasi di masa sekarang ini, banyak rakyat di Dunia Ketiga yang masih bergelombang dengan ketidakberdayaan dan kemiskinan. Kondisi ini tentu membutuhkan peran negara untuk melakukan pembangunan yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka agar bisa sejajar dengan negara-negara lainnya. *Kedua*, sistem globalisasi melalui mekanisme pasar tidak boleh dibiarkan terus mendominasi setiap aspek kehidupan rakyat karena cara ini tidak menjamin keadilan dalam distribusi pendapatan rakyat. Agar masing-masing rakyat mendapatkan haknya untuk hidup secara lebih baik maka diperlukan peran negara yang mengatasinya melalui pembangunan yang mendukung terpenuhinya aspirasi rakyat. Winarno (2005, p.151) lebih lanjut juga mengungkapkan fakta beberapa negara yang pernah dihantam krisis dan mampu mengatasinya karena peran efektif pemerintahnya, seperti yang terjadi di Korea Selatan dan Malaysia. Melalui tindakan pemerintah dengan seperangkat birokrasinya yang efektif, Korea Selatan dan Malaysia berhasil mengatasi krisis moneter dan ekonomi yang melanda keduanya serta mampu bangkit dari keterpurukan. Sebaliknya, oleh karena ketiadaan peranan yang efektif dari negara sebagaimana yang ditunjukkan oleh Korea Selatan dan Malaysia, Indonesia tidak berhasil mengatasi krisis moneter serta ekonomi yang membelitnya dan dampaknya masih dapat dirasakan sampai sekarang.

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi berdiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juni 1958. Provinsi Jambi terletak antara 0° 45' sampai 2° 45' Lintang Selatan dan 101° 0' - 104° 55' Bujur Timur, terletak ditengah Pulau Sumatera membujur sepanjang pantai timur sampai barat. Secara geografis, Provinsi Jambi terletak pada

Pantai Timur Pulau Sumatera berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Batas-batas wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : sebelah utara dengan Provinsi Riau, sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan sebelah timur dengan Laut Cina Selatan. Luas wilayah Provinsi Jambi adalah sebesar 53.435,92 km² yang terdiri dari daratan seluas 48.989,98 km² dan lautan 4.445,94 km² dengan panjang garis pantai 223,025 km. Wilayah daratan terluas di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin seluas 7.508 km² atau 15,31 % dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing seluas 6.205 km² dan 5.948 km².

Saat ini Provinsi Jambi terbagi menjadi sembilan kabupaten dan dua kota, yaitu Kabupaten Kerinci ibukotanya Kerinci, Kabupaten Merangin ibukotanya Bangko, Kabupaten Sarolangun ibukotanya Sarolangun, Kabupaten Batanghari ibukotanya Muara Bulian, Kabupaten Muaro Jambi ibukotanya Sengeti, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ibukotanya Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ibukotanya Kuala Tungkal, Kabupaten Tebo ibukotanya Muara Tebo, Kabupaten Bungo ibukotanya Muara Bungo, Kota Jambi ibukotanya Jambi, dan Kota Sungai Penuh ibukotanya Sungai Penuh.

Berdasarkan data BPS (2022), Provinsi Jambi memiliki beberapa potensi sumberdaya alam potensial berupa karet seluas 1.074.600 hektar, kelapa sawit seluas 396.800 hektar, kopi robusta dengan luas 29.782,00 hektar dan batubara 1,52 miliar Metrik Ton. Berlandaskan pada pandangan kalangan Skeptis dengan sederet argumentasinya terkait globalisasi, maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan justru harus tetap ada atau harus diperkuat. Terkait dengan diskursus peran signifikan negara dalam mengatasi masalah-masalah publik ini, maka kebijakan publik menjadi sesuatu yang seharusnya dikedepankan. Apalagi jika dikaitkan dengan upaya mengatasi masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dan menjadi tanggung jawab negara melalui pemerintah untuk mengatasinya. Thomas R. Dye (dikutip dalam HM, 2023) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi problem-problem yang dihadapi oleh rakyatnya. Sementara itu, Horald Laswell dan Abraham Kaplan (dikutip dalam HM, 2023) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang disusun dengan serangkaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik tertentu. Di sisi lainnya, Steven A. Peterson (dalam Nugroho, 2018, p. 203) memaknai kebijakan publik secara sederhana dengan menganggapnya sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi beragam masalah. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik (HM, 2023). Riant Nugroho (2018, p. 204) memaknai kebijakan publik sebagai setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Lebih lanjut dikatakan Riant Nugroho (2018, p. 216) bahwa kebijakan publik yang terbaik adalah inisiasi yang dapat memotivasi masyarakat untuk membangun kompetisi masing-masing, bukan sebaliknya, menjerumuskan masyarakat ke dalam pola ketergantungan.

Sebagai pihak yang diserahkan amanat mengelola daerah, Pemerintah Provinsi Jambi harus dapat menggunakan potensi lokalnya sebagai dasar untuk pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berbasis potensi lokal yang bertumpu pada pemahaman bahwa pembangunan nyata berasal dari dalam (pemerintah daerah dan masyarakat) dengan mengandalkan potensinya (Amien, 2005, p.155). Daerah yang memiliki potensi tertentu (sumber daya alam dan sumber daya manusia) dapat menerapkan model pembangunan yang sesuai dengan karakteristiknya. Harapannya, dengan mengandalkan sumber-sumber yang berasal dari dalam kawasan, maka semua orang merasa kepemilikan dan tujuan pembangunan dalam bentuk kesejahteraan akan tercapai dengan baik. Terkait hal ini, berdasarkan data BPS Provinsi Jambi 2022, ada 600.848 orang yang bekerja di sektor pertanian (terutama karet, kelapa sawit, kelapa dan kopi). Karenanya, dengan memfokuskan pengembangan pada tiga komoditas utama ini, Pemerintah Provinsi Jambi telah membantu kehidupan sebagian

besar penduduknya. Dengan cara ini, tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi juga akan meningkat karena sumber utama telah dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah sebagai pengendali utama di tingkat daerah. Setelah potensi lokal untuk dikelola agar pembangunan daerah dan asumsi kesejahteraan yang ingin dicapai diketahui, maka selanjutnya adalah apa bentuk nyata kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mewujudkannya. Sejalan dengan Riant Nugroho (2018, p.204) yang menginterpretasikan kebijakan publik sebagai setiap keputusan yang dibuat oleh negara atau daerah untuk mewujudkan tujuannya, Pemerintah Provinsi Jambi membuat kebijakan sehingga potensi lokal ini dapat lebih berguna untuk pengembangan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi ini didasarkan pada Konsep Deglobalisasi yang dilakukan oleh Walden Bello (2004) dan dijalankan oleh sistem birokrasi yang inovatif seperti yang dikemukakan oleh Dernhart (2003).

Berdasarkan Konsep Deglobalisasi Bello (2004) yang bertumpu pada kebutuhan lokal, Pemerintah Provinsi Jambi mengorientasikan pengelolaan potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan domestik. Seperti diketahui bahwa permintaan domestik akan komoditas karet, kelapa sawit, kelapa dan kopi sangat besar dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kelapa sawit dari 983.496,60 ton di tahun 2020 menjadi 1.063.677,60 ton di tahun 2021, kelapa dari 114.944 ton menjadi 115.657,50 ton, dan Karet dari 357.488 ton menjadi 358.055,40 ton. Luas panen tanaman perkebunan cenderung meningkat kecuali pada tanaman tembakau yang sedikit berkurang dari 61 hektar di tahun 2020 menjadi 59 hektar di tahun 2021. Upaya ini tentu tidak mudah, oleh karena itu diperlukan perangkat daerah yang inovatif berdasarkan konsep Layanan Publik Baru yang dilakukan oleh Dernhart (2003).

Upaya membangun daerah berdasarkan potensi lokal di Provinsi Jambi semakin kuat dengan visi dan misi yang dilakukan oleh wilayah yang dikenal pula sebagai Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini. Sebagai bentuk akomodasi menuju keinginan untuk mengembangkan daerah menjadi lebih baik, Provinsi Jambi menetapkan visi 'Mewujudkan Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah,

dan Profesional (MANTAP)'. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi besar ini, Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat misinya sebagaimana diuraikan dalam 3 langkah strategis berikut: Memantapkan tata kelola pemerintahan, memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, dan memantapkan kualitas sumberdaya manusia daerah.

Kegiatan turunan dari implementasi langkah strategis yang dirangkum dalam misi di atas telah banyak dilakukan. Di antara kegiatan-kegiatan ini adalah peningkatan infrastruktur jalan, peningkatan pendidikan dan fasilitas kesehatan serta infrastruktur dan Program Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake). Di samping itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga memiliki program unggulan dalam upaya Gubernur Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani membangun wilayah di jantung Pulau Sumatra ini. Di antaranya adalah pengembangan SMK berbasis kompetisi dan keunggulan lokal, pengembangan kawasan ekonomi baru SENTUSA (Sengeti-Tungkal-Sabak), percepatan pembangunan pabrik aspal karet, percepatan hilirisasi produk-produk pertanian, perikanan, perkebunan dan kelautan, percepatan pengembangan kawasan Geopark Merangin, pembentukan wilayah pertambangan rakyat, Batanghari Bersih dan restorasi lahan terancam.

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Provinsi Jambi ini tentu dimaksudkan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Berdasarkan data BPS (2022), laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi menempati urutan ke-13 dari 34 Provinsi di Indonesia, yaitu sebesar 3,66 persen. Terdapat 2 kota di Provinsi Jambi yang menjadi kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia, yaitu Kota Jambi (1,67) dan Kota Muaro Bungo (1,65). Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi turun menjadi 4,70% di Februari 2022. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dan didorong oleh pertumbuhan serapan kerja. Lebih lanjut, peningkatan jumlah penduduk bekerja tersebut mampu mendorong TPAK Februari 2022 yang juga tumbuh menjadi 68,86% dibandingkan Februari 2021 sebesar 67,30%.

Pada sisi kesejahteraan petani, indeks Nilai Tukar Petani menunjukkan penurunan pada triwulan II 2022 menjadi 134,23 dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 140,53. Penurunan NTP disebabkan

peningkatan indeks yang dibayar petani lebih tinggi dibandingkan indeks yang diterima petani yang berkontraksi 2,43%. Namun demikian, Nilai Tukar Petani pada triwulan II 2022 tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 123,49.

Selain itu, jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi pada Maret 2022 tercatat sebanyak 279,37 ribu orang atau menurun 14,49 ribu orang dibandingkan Maret 2021 sebesar 293,86 ribu orang. Penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan dampak berangsur pulihnya perekonomian daerah pasca pandemic COVID-19 yang menahan sejumlah aktivitas masyarakat hingga kegiatan komersial. Angka kemiskinan Provinsi Jambi pada Maret 2022 juga menurun dibandingkan September 2021, dimana terjadi perbaikan dari sisi persentase maupun jumlah penduduk. Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparsahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan perbaikan pada Maret 2022. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk miskin Provinsi Jambi dari sisi jumlah lebih banyak berada di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan, namun jika dilihat dari sisi persentase maka terlihat bahwa penduduk miskin di perkotaan lebih banyak dibandingkan di pedesaan. Pada Maret 2022 penduduk miskin pedesaan mencapai 152,03 ribu jiwa (54,42 persen dari total penduduk miskin), sedangkan di perkotaan sebesar 127,34 ribu jiwa (45,58 persen dari total penduduk miskin).

Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Provinsi Jambi tahun 2021 adalah 71,22 tahun, yang artinya tiap bayi yang lahir secara rata-rata diharapkan dapat hidup hingga usia 71,22 tahun. Selama rentang lima tahunan terakhir telah terjadi peningkatan nilai UHH, dimana pada tahun 2017 tercatat sebesar 70,76 tahun. Jika dibandingkan dengan nilai UHH nasional, UHH Provinsi Jambi kecenderungannya lebih rendah (nilai UHH Indonesia yang pada tahun 2021 mencapai 71,57 tahun).

Pada tahun 2021, Angka Melek Huruf (AHM) Provinsi Jambi sebesar 98,08 persen. Angka ini berada di atas angka nasional yang sebesar 96,04 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, maka penduduk 15 tahun

ke atas yang tinggal di pedesaan memiliki AMH lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan. Jika dilihat dari jenis kelamin, AMH laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun 2020 sebesar 8,55 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (8,45 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Provinsi Jambi tahun 2020 baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 2 (dua) atau kelas 3 (tiga) SMP. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi di atas sekali lagi mengonfirmasi signifikannya peran yang dilakukan pemerintah melalui kebijakannya. Tentu saja tidak semuanya berjalan sesuai yang direncanakan dan mencapai targetnya, ada aspek-aspek penting yang perlu pembenahan di masa-masa mendatang. Di antara aspek tersebut adalah masih cukup banyak (60%) penduduk pedesaan yang belum memiliki toilet sendiri, angka kemiskinan pedesaan yang masih tinggi (54,42%), rata-rata penduduk berpendidikan SMP/ sederajat, dan persoalan pengangkutan batubara yang masih perlu pembenahan secara komprehensif.

PENUTUP

Globalisasi menjadi sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari dan praktiknya memunculkan dua sisi, positif dan negatif. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah pasca otonomi daerah, berperan signifikan melalui kebijakan-kebijakan publik yang inovatif dan solutif sebagai upaya memanfaatkan peluang yang tersedia dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan globalisasi. Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan serangkaian kebijakan inovatif berbasis pada potensi lokal yang ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini berdampak cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat Provinsi Jambi yang ditunjukkan melalui berbagai indikator kesejahteraan yang menjanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

Amien, A. Mappadjantji (2005). *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi dan Pendidikan dari*

- Perspektif Sains Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bello, Walden (2004). *Deglobalization: Ideas For a New World Economy*. New York: Zed Books.
- Bird, R., dan Vaillancourt, F. (1998). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge University Press, United Kingdom.
- Brillo, Bing Baltazar C. (2017). 'The Politics of Lake Governance: Sampaloc Lake, Pandin Lake, and Tadalac Lake of the Laguna de Bay Region, Philippines'. *Asia-Pacific Social Science Review*, 17(1), p. 66-79.
- Dernhart, Janet V. and Dernhart, Robert B. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: M.E Sharpe.
- Friedman, Thomas (2007). *The World is Flat : A Brief History of the Twenty-first Century*. New York: Picador.
- Giddens, Anthony (2002). *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*. London: Profile Books.
- Hasjimzum, Yusnani (2014) 'Model Demokrasi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan (Studi Otonomi Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Reformasi)' *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, September 2014.
- HM, Pahrudin (2017). 'The Study of Government's Role for Welfaring Rubber Farmer in The Globalization Vortex'. *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 21 (2), November 2017, hlm. 117-130.
- HM, Pahrudin (2020). *Globalisasi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- HM, Pahrudin & Darminto, Citra (2021). 'The impact of local government policies on people's welfare in the regional autonomy era: A case study of Jambi City, Indonesia'. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 42 (2021) 732–737, <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2021.42.4.04>.
- HM, Pahrudin (2023). *Anatomi Kebijakan Publik: Sejarah, Konsep, Analisis dan Inovasi Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kisman, Zulfukar Aytac and Tasar, Izzet (2014). 'The Key Element of Local Development' *Procedia Economics and Finance*, 15, p.1689-1696.
- Marvasti, Amir B. 2004. *Qualitative Research in Sociology*. London: SAGE Publications.
- Miles, Matthew B. and Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nak-ai, Worayuth etc. (2018). 'Community Public Policy Process for Solving Cadmium Contamination Problems in The Environment: A Case Study of Mae Sod District, Tak Province'. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 39 (2018), p. 59-66.
- Nugroho, Riant. (2018). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Osborne, David and Gaebler, Ted (1992). *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*. New York: Penguin Books Ltd.
- Petras, James and Veltmeyer, Henry (2001). *Globalization Unmasked: Imperialism in 21st Century*. London: Fernwood Publishing and Zed Books.
- Ritzer, George (2006). *The Globalization of Nothing: Mengkonsumsi Kehampaan di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sharma, Chanchal Kumar (2015). Reimagining Federalism in India: Exploring the Frontiers of Collaborative Federal Architecture. *Asia-Pacific Social Science Review*, 15 (1) 2015, pp. 1-25.
- Tandon, Yash (2009). *Development and Globalization*. Nairobi: Pambazuka Press.
- Tasrin, Krimiyati dan Wulandari, Putri (2012). 'Kajian Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Barat)'. *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 8, No. 2, 2012.

- Wikowski, Jaroslaw and Kiba-Janiak, Maja (2014). 'The Role of Local Governments in The Development City Logistics' *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 125, p.373-385.
- Winarno, Budi (2005). *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru: Peran Negara Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Tajidu Press.
- Wolf, Martin (2016). 'Will The Nation-State Survive Globalization?' <https://www.foreignaffairs.com/articles/2001-01-01>. Akses Tanggal 23 Maret 2016.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. *Provinsi Jambi Dalam Angka 2022*. Jambi: BPS.